AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Alifah Rahmaniah[1], Ahmad Zaki Ardio Putra[2], Eva Hany Fanida[3], Melda Fadiyah Hidayat[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Surabaya*
E-mail : 25040674363@mhs.unesa.ac.id[1], 25040674373@mhs.unesa.ac.id[2], evafanida@unesa.ac.id[3], meldahidayat@unesa.ac.id[4]

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) management in realizing financial transparency in the DKI Jakarta Provincial Government. The method used is a qualitative approach with descriptive research, through literature and documentation studies of various secondary data sources such as journals, books, and regional government financial reports. The results indicate that accountability in APBD management plays a crucial role in creating good governance, characterized by transparency, efficiency, and responsibility in the use of public funds. The APBD management process includes interrelated stages of planning, implementation, reporting, and evaluation. Furthermore, accountability is also reflected through indicators of honesty and legal compliance, accountability of processes, programs, and policies. Although the DKI Jakarta Provincial Government has a fairly good system and regulations, several obstacles remain, such as suboptimal program implementation and inaccurate targeting. Therefore, improvements in the quality of planning, oversight, and transparency are needed so that APBD management can provide maximum benefits to the community and increase public trust.

Keywords : *Accountability, APBD, Transparency, Regional Finance, Good Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mewujudkan transparansi keuangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, melalui studi literatur dan dokumentasi terhadap berbagai sumber data sekunder seperti jurnal, buku, serta laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan APBD memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang ditandai dengan transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran publik. Proses pengelolaan APBD meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi yang saling berkaitan. Selain itu, akuntabilitas juga tercermin melalui indikator kejujuran dan kepatuhan hukum, akuntabilitas proses, program, serta kebijakan. Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sistem dan regulasi yang cukup baik, masih terdapat beberapa kendala seperti kurang optimalnya pelaksanaan program dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, serta transparansi agar pengelolaan APBD dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, APBD, Transparansi, Keuangan Daerah, Good Governance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi alat kebijakan publik yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap aktivitas pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini karena dana yang dikelola oleh pemerintah sebagian besar berasal dari masyarakat melalui pajak daerah, retribusi, maupun berbagai sumber penerimaan lainnya. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2002).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD mencerminkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, mulai dari sektor pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dan pengelolaan APBD harus direncanakan secara matang agar mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan yang ada di daerah.

Selain sebagai alat perencanaan pembangunan, APBD juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Melalui pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah dapat menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, akuntabilitas berperan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik menuntut agar penggunaan dana publik dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas baik secara vertikal maupun horizontal.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, isu mengenai pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat semakin menuntut agar pemerintah mampu memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran serta dampak dari program yang dilaksanakan. Transparansi dan akuntabilitas yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, laporan

keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik mengenai bagaimana anggaran dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Berdasarkan data indeks persepsi korupsi, tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berbagai kasus penyalahgunaan anggaran serta program pembangunan yang tidak tepat sasaran menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa akuntabilitas hanya sebatas pada penyusunan laporan penggunaan anggaran, tanpa memperhatikan sejauh mana program yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat (Rangkuti, 2018).

Permasalahan lain yang sering muncul dalam pengelolaan anggaran adalah kurang optimalnya perencanaan program serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran atau program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntabilitas yang kuat agar setiap tahap dalam pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sistem akuntabilitas tersebut meliputi proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, hingga pelaporan hasil kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur sistem pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggaran secara transparan kepada masyarakat. Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan jumlah penduduk yang besar serta kompleksitas permasalahan perkotaan yang tinggi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu mengelola anggaran daerah secara efektif dan akuntabel. Besarnya APBD yang dimiliki oleh DKI Jakarta menjadikan pengelolaan anggaran di daerah ini sebagai salah satu sorotan publik, terutama terkait dengan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan. Analisis terhadap sistem akuntabilitas dalam pengelolaan APBD diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan proses pengelolaan anggaran serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran publik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah daerah, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan menganalisis data yang telah diperoleh untuk memberikan gambaran mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting dalam peneleggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Pemerintahan Provinsi DKI Jakarrta, Akuntabilitas tidak hanya berarti kewaiban membat laporan, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mempertanggung jawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat secara terbuka, jelas dan dapat dipahami. Hal ini penting karena dana yang di digunakan dalam APBD pada dasarnya berasal dari masyarakat, baik melalui pajak maupun retribusi daerah, sehingga penggunaannya harus benar-benar dipertanggung jawabkan.

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah mampu mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawabmaka tingkat kepercayaan publik akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelola anggaran, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat bahkan memicu berbagai permasalahan seperti korupsi. Menurut (Mardiasmo,2009).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemerintah untuk memberikan pertanggung jawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Selain itu, akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan konsep good governance. Pemerintahan yang baik tidak hanya dilihat dari hasil pembangunan, tetapi juga dari proses bagaimana kebijakan dan anggaran dikelola. Dalam hal ini, akuntabilitas berjalan berdampingan dengan transparansi dan partisipsi masyarakat. (Sedarmayanti,2012) menyatakan bahwa akuntabilitas, transportasi dan partisipasi merupakan pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan APBD

tidak bisa dilakukan secara tertutup, melainkan harus melibatkkan berbagai pihak serta diawasi oleh publik.

Dalam pelaksanaannya, pengelola APBD terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika salah satu tahapan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka keseluruhan proses pengelolaan anggaran juga akan terganggu atau terhambat. Oleh karena itu, diperlukannya sistem yang terstruktur dan pengawasan yang ketat agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan tujuaan yang telah ditetapkan (Raba, 2020).

Dalam pelaksananannya, pengelola APBD terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, Tahapan tersebut meliputi:

Perencanaan Anggaran

Tahap awal sebelum anggaran digunakan, pada tahap ini pemerintah daerah menentukan program apa aja yang akan dijalankan. Perencanaan biasanya dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimana masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan usulan. Artinya pemerintah tidak hanya membuat rencana sendiri tetapi juga mendengar kebutuhan masyarakat. Namun, karena anggaran terbatas, tidak semua usulan direalisasikan, sehingga pemerintah harus menentukan prioritas program yang paling penting dan mendesak. Hal ini juga di perkuat oleh pendapatan bahwa perencanaan anggaran yang baiik harus berbasis kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran (Adisasmita, 2011).

Pelaksanaan Program

Tahap ini menjalankan rencana yang sudah dibuat. Di tahap ini, pemerintah menggunakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program lainnya. Dalam tahap ini yang ppaling penting yaitu kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Jika pelaksanaan ini tidak sesuai dengan rencana, maka tujuan awal bisa tidak tercapai. Menurut (Mardiasmo,2012) Penggunaan anggaran yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan yang tidak efektif juga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan (Halim, 2007). Oleh karena itu, pemerintah harus benar benar teliti dan bertanggung jawab dalan menggunakan anggaran.

Pelaporan Keuangan

Bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Setelah anggaran digunakan, pemerintah wajib membuat laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci penggunaan dana tersebut. Laporan ini penting agar masyarakat bisa mengetahui apakah anggaran digunakan dengan benar atau tidak. Jika laporan disusun dengan baik dan transpara, maka masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah. Laporan keuangan pemerintah juga harus memenuhi prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami agar benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi (Halim & Iqbal, 2012).

Evaluasi Kinerja

Tahap ini yatu tahap yang melihat apakah program yang dijalankan berhasil atau tidak. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan hasil lapangan. Seperti, apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Menurut (Badrudin, 2012), evaluasi penting agar anggaran tidak hanya habis digunakan, tetapi juga memberikan manfaat nyata. Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa

mendatang agar kesalahan yang sama tidak trulang kembali. Jika hasilnya kurang maksimal, maka pemerintah harus memperbaiki di periode berikutnya.

Selain tahapan tersebut, Akuntabilitas pengelolaan APBD juga dapat dilihat melalui beberapa indikator penting. Salah satunya adalah akuntabilitas kejujuran hukum. Dalam hal ini, pemerintah harus jujur dalam mengelola anggaran dan tidak menyakahgunakan wewenang. Selain itu, semua kegiatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005. Dengan adanya tauran ini, setiap penggunaan anggaran memiliki batasan yang jelas. Namun, aturan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan sikap jujur dari aparat pemerintah. Integritas sangat penting agar akuntabilitas bisa berjalan dengan baik (Sedarmayanti, 2012).

Selanjutnya yaitu akuntabilitas proses, bagaimana cara pengelolaan anggaran dilakukan. Dalam hal ini, terdapat beberapa point penting yang mendukung proses tersebut, antara lain:

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan. Dengan sistem ini, data keuangan menjadi lebih rapi dan mudah diperiksa, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan atau kecurangann. Sistem ini juga membantu meningkatkan transparansi karena setiap transaksi dapat ditelusuri dengan jelas (Ulum & hafiez, 2016).

Sistem Informasi Manajemen

Sistem yang membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Data yang sudah diolah akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil akan lebih tepat. Penggunaan sistem informasi yang baik akan meningkatkan kualitas pengambilan keputsan dalam organissi pemerintahan (Kuswandi, 2016).

Standar Operasional Prosedur

Aturan kerja yang harus diikuti olah setiap pegawai. SOP ini penting agar setiap kegiatan dilakukan dengan cara yang benar dan tidak asal – asalan. SOP juga berfungsi untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan tugas sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses administrasi. Dengan adanya ketiga hal tersebut, proses pengelolaan APBD menjadi lebih teratur, jelas dan mudah diawasi.

Selain itu, terdapat juga Akuntabilitas program, yaitu sejauh mana program yang dijalankan benar – benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta telah menyusun berbagai rencana seperti RPJMD dan Renstra sebagai pedoman pelaksanaan program. Program yang baik seharusnya tepat sassaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya masih ada program yang kurang efektif. (Halim, 2010) menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena perencanaan yang kurang matang atau data yang tidak akurat. Selain itu, kurangnyya koordinasi antar instansi juga dapat menjadi penyebab program tidak berjalan optimal (Nasution, 2009). Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi agar program yang dijalankan benar – benar memberikan manfaat.

Akuntabilitas kebijakan merupakan tanggung jawab pemerintah atas kebijakan yang dibuat. Setiap kebijakan yang harus dimiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dijelaskan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus terbuka dalam memberiikan informasi. Saat ini, keterbukaan informasi sudah semakin mudah dilakukan dengan adanya teknologi, seperti website resmi pemerintah dan media sosial. Menurut (Kusumastuti, 2015), transparansi informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterbukaan ini juga mendorong

partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintah ssehingga tercipta kontrol sosial yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provisi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif seperti laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dana publik secara transparan, efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan APBD yang baik harus melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, akuntabilitas juga dapat dilihat melalui beberapa indikaotr seperti Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program serta akuntabilitas kebijakan. Secara umum, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sistem dan regulasi yang cukup baik dalam menggunakan akuntabilitas pengelolaan APBD, seperti adanya dasar hukum yang jelas, sistem informasi yang terstruktur, serta mekanisme pelaporan yang transparan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti program yang belum sepenuhnya tepat sasaran, pelaksanaan yang belum optimal, serta perlunya peningkatan integritas aparatur pemerintah. Dengan demikian, Akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban formal semaya, tetapi juga harus benar – benar diwujudkan dalam setiap proses pengelolaan anggaran agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2011). *Manajemen pemerintahan daerah*. Makassar: Graha Ilmu.

Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi revisi). Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2010). *Akuntansi keuangan daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Bunga rampai manajemen keuangan daerah* (Edisi ke-3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kusumastuti, P. (2015). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan demokrasi ke depan.* Jakarta: PT Gramedia.

Kuswandi, A. (2016). *Manajemen pemerintahan daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).

Mardiasmo. (2003). *Perpajakan* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Nasution, F. A. (2009). *Pemerintah daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah*. Jakarta: PT Sofmedia.

Raba. (2020). *Akuntabilitas: Konsep dan implementasi*. Malang: UMM Press.

Sedarmayanti. (2012). *Good governance: Pemerintahan yang baik*. Bandung: Mandar Maju.

Ulum, I., & Hafiez. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Malang: Aditya Media.

.